

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intervensi kebijakan politik (*policy*) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dilakukan terhadap petani pembudidaya ikan pada sentra produksi ikan di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Program tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian target produksi, dan juga diharapkan berkontribusi menumbuhkan wirausaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BLM PUMP merupakan peran politik pemerintah dalam arti kebijaksanaan politik (*policy*) terhadap kepentingan umum. Dengan demikian intervensi yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya memberikan bantuan ekonomi kepada petani dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat diiringi dengan kebijakan.

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (2010), mengeluarkan kebijakan/peraturan Nomor Kep. 32/Men/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Indonesia. Parsons (2006) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Hoogerwerf (1972) menyatakan bahwa objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya.

Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap usaha budidaya petani ikan, muncul berbagai fakta dan fenomena baru ditengah-tengah masyarakat petani. Fenomena tersebut merupakan kecurigaan petani dalam proses implementasi pendistribusian BLM yang disertai kepentingan politik praktis dari berbagai pihak, dimana BLM tersebut seharusnya diterima oleh petani yang berhak menerimanya.

Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan akibat terhadap eksistensi (keberadaan) usaha dan aktivitas petani sebagai penggerak usaha budidaya, terutama berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek teknis: Penerapan teknis budidaya dalam tata kelola budidaya ikan, dan kemampuan produksi yang dihasilkan usaha budidaya tersebut.
2. Aspek ekonomi: Kemampuan usaha budidaya petani ikan menghasilkan pendapatan, dan efisiensi penggunaan biaya selama proses produksi.
3. Aspek sosial: Aktivitas dan interaksi petani terhadap lingkungan sosialnya untuk mencari solusi mengatasi permasalahan yang timbul selama mengelola usaha budidaya ikan, baik dalam KUB maupun antar KUB.

4. Aspek politik: Persepsi petani terhadap kebijakan politik (*policy*) yang dicanangkan pemerintah, dan tuntutan transparansi implementasi pendistribusian BLM kepada petani yang berhak menerima.
5. Implikasi akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM kepada petani sebagai penggerak usaha budidaya, baik implikasi menimbulkan efek positif, maupun implikasi menimbulkan efek negatif.

Menurut Andriani dkk (2013), bahwa pengertian eksistensi yaitu suatu keberadaan yang diakui oleh diri sendiri dan juga oleh pihak lain, yang mengandung unsur untuk bertahan. Kemudian Putri dkk (2011) menyatakan bahwa eksistensi suatu kelompok dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menunjukkan keberadaan kelompok dalam lingkungan sosialnya dengan berbagai bentuk aktivitas yang sesuai dengan jenis dan tujuan kelompok dengan optimal sehingga mampu menghasilkan prestasi yang diakui oleh masyarakat luas. Pramono (2017) bahwa pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung berasal dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian implikasi lainnya berasal dari implikasi adalah suatu analisis atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Kemudian Fajarmuhsy (2017) menyatakan implikasi itu sendiri adalah sebuah akibat atau suatu hal perihal yang punya dampak secara langsung, kepada hal lain.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan fakta dan fenomena yang berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian, karena belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga hal tersebut belum ada informasi. Kemudian untuk beberapa aspek (teknis, ekonomi, sosial, politik) sesuai dengan berbagai permasalahan yang menjadi pertanyaan masing-masing, yaitu:

1. Aspek teknis: Bagaimana kategori penerapan teknis budidaya ikan patin dalam tata kelola budidaya. Sedangkan penerapan teknis tersebut tidak terlepas dari bagaimana langkah-langkah pembesaran ikan yang benar dalam tata kelola budidaya. Kemudian, apakah usaha budidaya dapat dan mampu menghasilkan produksi. Sedangkan kemampuan produksi usaha budidaya tersebut tidak terlepas dari seberapa besar tingkat kemampuan menghasilkan produksi berdasarkan faktor-faktor produksi yang dimiliki petani untuk digunakan/dimanfaatkan petani dalam proses produksi.
2. Aspek ekonomi: Apakah usaha budidaya petani ikan tersebut dapat dan mampu menghasilkan pendapatan. Sedangkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tersebut

tidak terlepas dari seberapa besar tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan, dan seberapa besar nilai ekonomi (Rp) dari hasil produksi ikan, baik dijual secara tunai, maupun produksi ikan yang dikonsumsi petani secara non tunai sebagai sumber penerimaan usaha. Sedangkan pengeluaran (biaya) usaha budidaya berkaitan dengan besar penggunaan biaya, baik biaya variabel maupun tetap untuk membiayai faktor-faktor produksi.

3. Aspek sosial: Bagaimana kategori dinamika petani melakukan kegiatan dalam lingkungan sosial usaha budidaya petani ikan. Sedangkan dinamika petani tersebut tidak terlepas dari bagaimana petani melakukan aktivitas dan interaksi dalam KUB maupun antar KUB untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan usaha budidaya, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama mengelola usaha budidaya ikan.

4. Aspek politik: Bagaimana kategori persepsi petani terhadap kebijakan politik (*policy*) yang dicanangkan pemerintah). Sedangkan hal tersebut tidak terlepas dari apa dan bagaimana tujuan, manfaat BLM, sosialisasi informasi teknologi budidaya ikan dan kegiatan percontohan perikanan budidaya di kawasan pemeliharaan/ sentra produksi ikan (Aspek politik 1). Kemudian bagaimana kategori implementasi pendistribusian BLM kepada petani yang berhak menerimanya. Sedangkan hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana implementasi kebijakan politik (*policy*) BLM yang sesuai dengan Kriteria Calon Penerima (CP), Kriteria Umum Calon Penerima (CP), Kriteria Teknis Calon Penerima (CP), dan Mekanisme Pengusulan dan Penetapan KUB Calon Penerima BLM (Aspek politik 2).

5. Implikasi aspek politik terhadap petani: Apa dan bagaimana efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya. Sedangkan implikasi tersebut tidak terlepas dari apa bentuk efek implikasi tersebut, baik implikasi yang menimbulkan efek positif, maupun implikasi yang menimbulkan efek negatif.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka diidentifikasi permasalahan masing-masing aspek dengan rumusan sebagai berikut;

1. Penelitian Tahap I (Survei Pendahuluan):

a. Profil Petani Budidaya Ikan.

1). Bagaimana profil petani budidaya ikan ?

2. Penelitian Tahap II:

a. Aspek Teknis:

1). Bagaimana kategori penerapan teknis budidaya dalam tata kelola budidaya petani ikan ?

- 2). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori penerapan teknis budidaya petani ikan ?
- 3). Bagaimana kemampuan produksi usaha budidaya petani ikan ?
- 4). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi kemampuan produksi usaha budidaya petani ikan ?

b. Aspek Ekonomi:

- 1). Bagaimana kemampuan usaha budidaya ikan menghasilkan pendapatan?
- 2). Bagaimana efisiensi penggunaan biaya produksi usaha budidaya petani ikan berdasarkan penggunaan faktor produksi yang dimiliki petani ?
- 3). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi aspek ekonomi usaha budidaya petani ikan ?

c. Aspek Sosial:

- 1). Bagaimana katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB ?
- 2). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB ?

d. Aspek Politik:

- 1). Bagaimana katagori aspek politik 1 (persepsi petani terhadap kebijakan poli-tik (*policy*) yang dicanangkan pemerintah) ?
- 2). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori aspek politik 1 ?
- 3). Bagaimana katagori aspek politik 2 (transparasi implementasi pendistribusian (BLM) kepada petani ?
- 4). Bagaimana akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori aspek politik 2 ?

3. Penelitian Tahap III:

a. Implikasi Aspek Politik terhadap Petani dalam Aspek Teknis, Ekonomi, Sosial.

- 1). Bagaimana efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani se-bagai subjek penggerak usaha budidaya dalam penerapan aspek teknis ?



- 2). Bagaimana efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek ekonomi ?
- 3). Bagaimana efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka disusun tujuan penelitian untuk setiap tahap penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Tahap I (Survei Pendahuluan):

a. Profil Petani Budidaya Ikan

- 1). Menganalisis profil petani budidaya ikan.

2. Penelitian Tahap II:

a. Aspek Teknis:

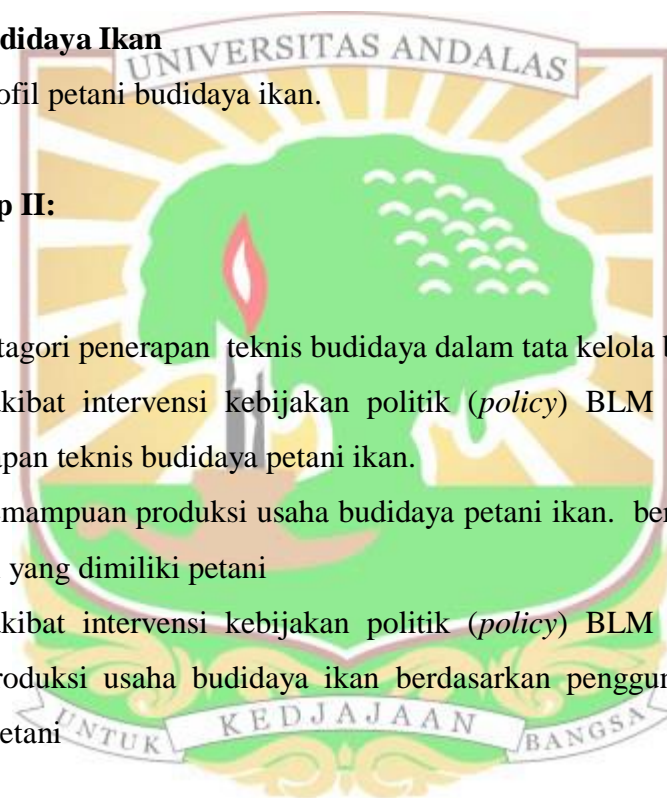
- 1). Menganalisis katagori penerapan teknis budidaya dalam tata kelola budidaya petani ikan.
- 2). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi katagori penerapan teknis budidaya petani ikan.
- 3). Menganalisis kemampuan produksi usaha budidaya petani ikan. berdasarkan penggunaan faktor produksi yang dimiliki petani
- 4). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi kemampuan produksi usaha budidaya ikan berdasarkan penggunaan faktor produksi yang dimiliki petani

b. Aspek Ekonomi:

- 1). Menganalisis kemampuan usaha budidaya ikan menghasilkan pendapatan.
- 2). Menganalisis efisiensi penggunaan biaya produksi usaha budidaya petani ikan.
- 3). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi pendapatan dan efisiensi penggunaan biaya produksi usaha budidaya petani ikan.

c. Aspek Sosial:

- 1). Menganalisis katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB.
- 2). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB.



d. Aspek Politik:

- 1). Menganalisis katagori aspek politik 1 (persepsi petani terhadap kebijakan po-litik (*policy*) yang dicanangkan pemerintah).
- 2). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori aspek politik 1.
- 3). Menganalisis katagori aspek politik 2 (transparasi implementasi pendistribusi-an BLM kepada petani penerima BLM).
- 4). Menganalisis akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksis-tensi katagori aspek politik 2.

3. Penelitian Tahap III:

a. Implikasi Aspek Politik terhadap Petani dalam Aspek Teknis, Ekonomi, Sosial

- 1). Menganalisis efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek teknis.
- 2). Menganalisis efek implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek ekonomi.
- 3). Menganalisis efek implikasi kebijakan politik (*policy*) terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek sosial.

D. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka disusun hipotesis untuk setiap tahap penelitian sebagai berikut:

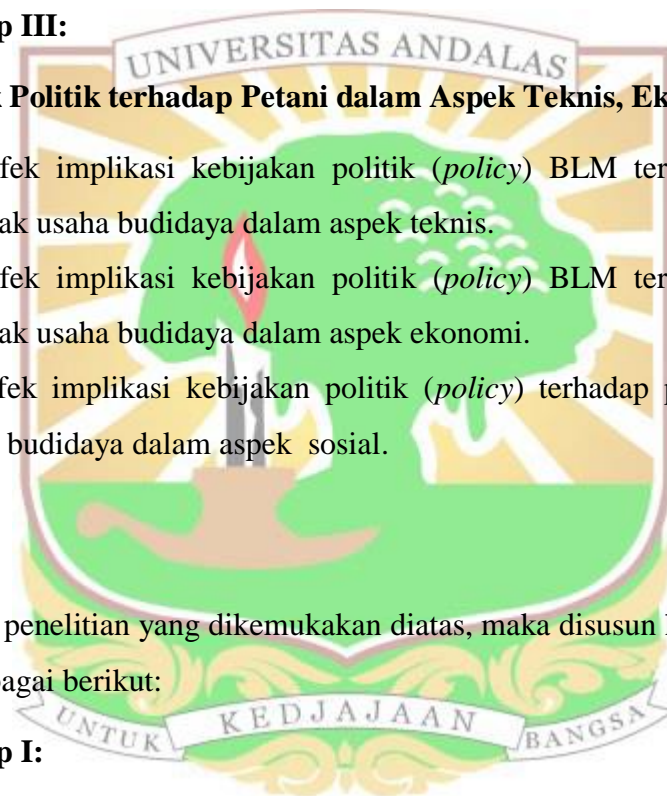
1. Penelitian Tahap I:

a. Profil Petani Budidaya

- 1). H₀: Petani budidaya ikan peserta BLM merupakan objek penggerak, tidak termasuk salah satu faktor produksi (tenaga kerja keluarga) dalam usaha budidaya, dan berada pada usia tidak produktif.
H₁: Petani budidaya ikan peserta BLM merupakan subjek penggerak, termasuk salah satu faktor produksi (tenaga kerja keluarga) dalam usaha budidaya, dan berada pada usia produktif.

2. Penelitian Tahap II:

a. Aspek Teknis:



- 1). H0: Katagori penerapan teknik budidaya dalam tata kelola budidaya ikan ber-ada pada tingkat/ranking R (Rendah) atau berada pada katagori CB/CS (Cukup Baik/Cukup Sesuai) dengan teknik budidaya.
H1: Katagori penerapan teknik budidaya dalam tata kelola budidaya ikan ber-ada pada tingkat/ranking T (Tinggi) atau berada pada katagori SB/SS (Sangat Baik/Sangat Sesuai) dengan teknik budidaya.
- 2). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori penerapan teknis budidaya mengalami perubahan/penurunan secara negativ (-)
H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori penerapan teknis budidaya mengalami perubahan/peningkatan se-cara positiv (+)
- 3). H0: Usaha budidaya peserta BLM tidak mampu menghasilkan produksi.
H1: Usaha budidaya peserta BLM mampu menghasilkan produksi.
- 4). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi pro-duksi usaha budidaya ikan mengalami perubahan/penurunan secara ne-gativ (-).
H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi produksi usaha budidaya ikan mengalami perubahan/peningkatan secara positiv (+).

b. Aspek Ekonomi:

- 1). H0: Usaha budidaya petani ikan tidak mampu menghasilkan pendapatan, dan tidak efisien dalam penggunaan biaya produksi (indeks investmen krite-ria berada pada *Revenue Cost Ratio* <1)
H1: Usaha budidaya petani ikan mampu menghasilkan pendapatan, efisien dalam penggunaan biaya produksi (indeks investmen kriteria ber-ada pada *Revenue Cost Ratio* > 1)
- 2). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi as-pek ekonomi usaha budidaya ikan mengalami perubahan/penurunan secara negativ (-)
H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi as-pek ekonomi usaha budidaya ikan mengalami perubahan/peningkatan secara positiv (+)

c. Aspek Sosial:

- 1). H0: Katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB. berada pada kondisi tingkat/ranking R (Rendah) atau berada pada kondisi katagori CD (Cukup Dinamis).
H1: Katagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB berada pada kondisi tingkat/ranking T (Tinggi) atau berada pada kondisi katagori SD (Sangat Dinamis).

2). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB mengalami perubahan /penurunan secara negatif (-)

H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori dinamika petani dalam KUB dan antar KUB mengalami perubahan /peningkatan secara positif (+)

d. Aspek Politik:

1). H0: Katagori politik 1 (katagori persepsi petani terhadap kebijakan politik (*policy*) BLM yang dicanangkan pemerintah), berada pada kondisi ting-kat/ranking R (Rendah) atau berada pada kondisi katagori CP/CM (Cu-kup Positiv/Cukup Menerima)

H1: Katagori politik 1 (katagori persepsi petani terhadap kebijakan politik (*po-licy*) BLM yang dicanangkan pemerintah) berada pada kondisi tingkat ranking T (Tinggi) atau berada pada kondisi katagori SP/SM (Sangat Po-sitiv/Sangat Menerima)

2). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori politik 1 mengalami perubahan/penurunan secara negatif (-)

H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori politik 1 mengalami perubahan/peningkatan secara positif (+)

3). H0: Katagori politik 2 (katagori transparansi implementasi pendistribusian BLM) kepada petani, berada pada kondisi tingkat/ranking R (Rendah) atau berada pada kondisi katagori CT/CS (Cukup Transparan/Cukup Sesuai) dengan kebijakan politik (*policy*) BLM

H1: Katagori politik 2 (katagori transparansi implementasi pendistribusian BLM) kepada petani, berada pada kondisi tingkat/ranking T (Tinggi) atau berada pada kondisi katagori ST/SS (Sangat Transparan/Sangat Sesuai) dengan kebijakan politik (*policy*) BLM

4). H0: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori politik 2, mengalami perubahan/penurunan secara negatif (-)

H1: Akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap eksistensi ka-tagori politik 2, mengalami perubahan/peningkatan secara positif (+)

3. Penelitian Tahap III:

a. Implikasi Aspek Politik Terhadap Aspek Teknis, Ekonomi, Sosial.

1). H0: Implikasi kebijakan politik (*policy*)BLM menimbulkan efek negatif (-) terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek (Teknis, Ekonomi, Sosial)

H1: Implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM menimbulkan efek positif (+) terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam aspek (Teknis, Ekonomi, Sosial).

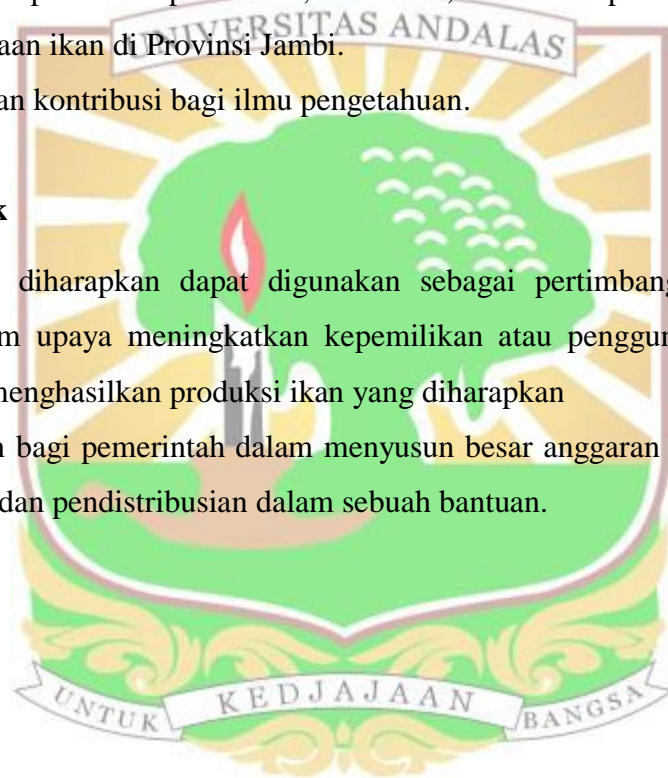
E. Manfaat Penelitian

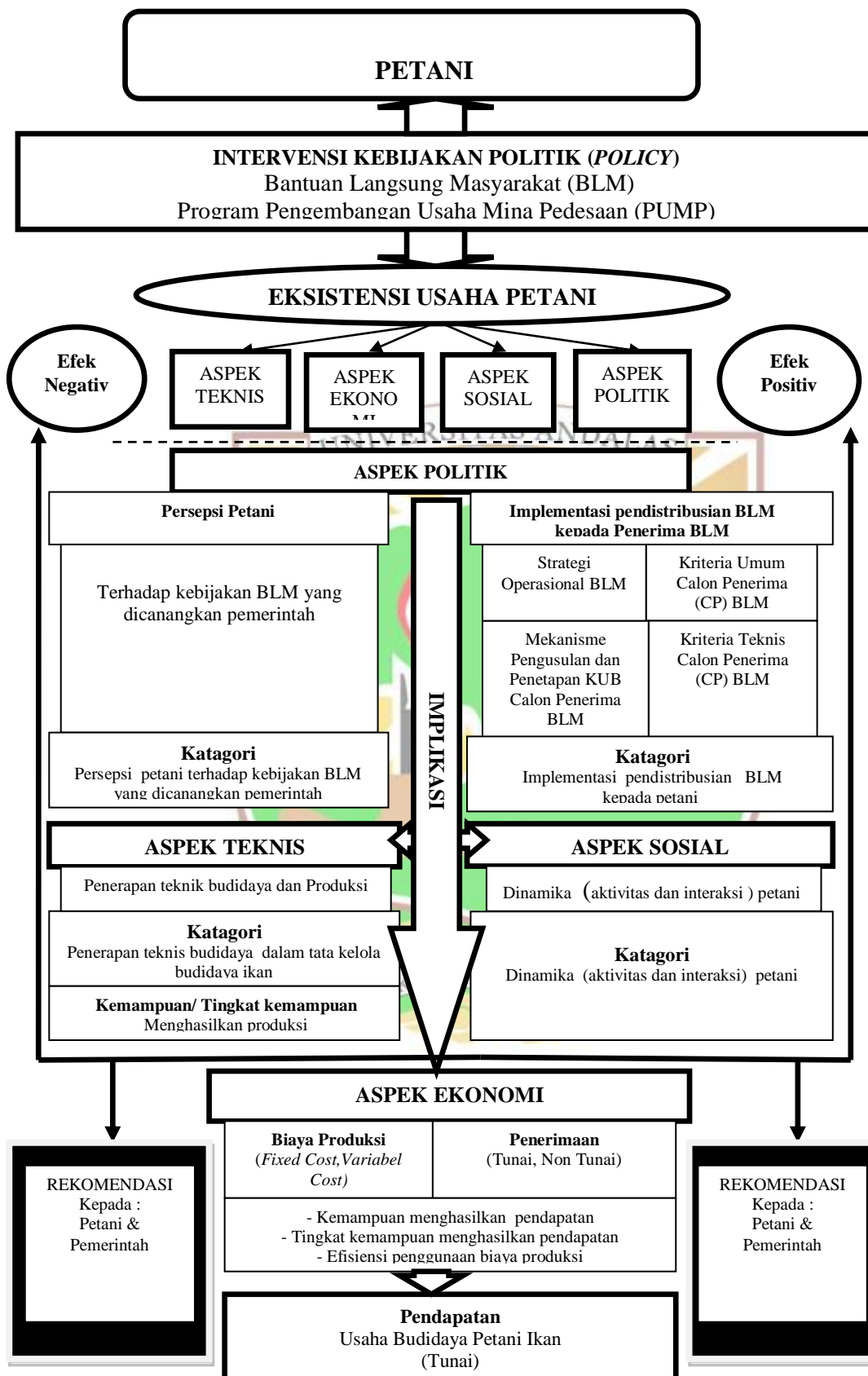
1. Manfaat Akademik

- a. Untuk mengetahui peranan aspek teknis, ekonomis, sosial dan politik dalam pelaksanaan usaha pembudayaan ikan di Provinsi Jambi.
- b. Untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktik

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi petani dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepemilikan atau penggunaan faktor - faktor produksi untuk menghasilkan produksi ikan yang diharapkan
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyusun besar anggaran untuk pengembangan usaha perikanan dan pendistribusian dalam sebuah bantuan.





Gambar 1. ROADMAP PENELITIAN